

RINGKASAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia memerlukan pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian internal di instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (LHPK) tahun 2024, komponen penetapan tujuan pada SPIP di Kabupaten Banyumas memperoleh nilai 1,6 yang menunjukkan bahwa penerapannya masih belum optimal. Selain itu berdasarkan evaluasi yang dilakukan, kualitas penerapan penetapan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari belum terwujudnya dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang memenuhi standar baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penetapan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif dalam Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyumas guna memahami kendala yang dihadapi serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan penetapan tujuan tersebut. dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan SPIP komponen penetapan tujuan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Ripley dan Franklin yang dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengambilan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penelaahan dokumen terkait serta observasi langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komponen penetapan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif belum dapat dikatakan baik. Pada aspek kepatuhan, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya patuh terhadap Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021, terutama terkait indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART. Pada Aspek Lancarnya Rutinitas fungsi sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan upaya Pemkab Banyumas untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui Bimtek, In House Training menjadi solusi dalam menghadapi kendala yang ada. Selain itu Kabupaten Banyumas dapat melakukan studi tiru dengan daerah lain yang telah berhasil menerapkan komponen penetapan tujuan didalam SPIP.

Kata Kunci : Implementasi, Penetapan Tujuan, Pengendalian Intern

SUMMARY

The administration of government systems in Indonesia requires internal control to ensure efficient, effective, transparent, and accountable implementation. The government has enacted Government Regulation No. 60 of 2018 on the Government Internal Control System (SPIP) and BPKP Regulation No. 5 of 2021 on SPIP Maturity Assessment as guidelines for implementing internal control in government institutions. Based on the 2024 Quality Assurance Report (LHPK), the goal-setting component of SPIP in Banyumas Regency received a score of 1.6, indicating suboptimal implementation. Furthermore, evaluations reveal that the quality of implementing effective and collaborative governance goal-setting has not yet reached an optimal level. This is evident from the absence of performance planning documents that meet high standards.

This study aims to analyze the implementation of effective and collaborative governance goal-setting in the Government Internal Control System (SPIP) of Banyumas Regency, understand the challenges encountered, and identify strategies to improve the quality of goal-setting implementation. A qualitative and descriptive approach was employed to describe the implementation conditions of SPIP's goal-setting component. Ripley and Franklin's implementation theory served as the foundation for the study, employing purposive sampling techniques for data collection. Data was gathered through interviews, document reviews, and direct observations.

The findings indicate that the implementation of the effective and collaborative governance goal-setting component cannot yet be deemed satisfactory. Regarding compliance, Banyumas Regency has not fully adhered to BPKP Regulation No. 5 of 2021, particularly concerning performance indicators that fail to meet SMART criteria. However, the routine functions have been effectively maintained, demonstrated by efforts to enhance human resource competencies through workshops, in-house training, and other initiatives. Additionally, the regency is encouraged to adopt best practices from other regions that have successfully implemented the SPIP goal-setting component.

Keywords: Implementation, Goal Setting, Internal Control